

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) BERBASIS
NEEDS ASSESSMENT PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA**

TESIS



**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar
Magister *Chief Information Officer (CIO)***

**Oleh:
ZULFADLI
NIM. 1200165**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

ABSTRACT

Zulfadli. 2014. Analysis Of Implementation Of Information Systems Electronic Procurement Service Based Needs Assessment On Nagan Raya Regency Government.

This research background was based on discrepancy between the need and the implementation information systems on electronic procurement service in the regency of Nagan Raya, including IT human resource placement does not comply with the technical and managerial qualifications. This study aims to determine how to achieve the need for internal stakeholders and external stakeholders with the implementation of electronic procurement service at the Nagan Raya Regency Government.

This research is descriptive qualitative. Main point of this research study in electronic procurement service at Nagan Raya Regency Government of Aceh Province. The source of data this research was the management, procurement committee, LPSE managers, providers of goods and services. Data were collected with guide instrument of interviews, observation sheet, and study documentation.

The results of this study showed that the implementation of information systems electronic procurement service on Nagan Raya Regency Government generally had been able to meet the needs of stakeholders, in terms of transparency, market access and fair competition, supports the process of monitoring and auditing, and access to real time information. The implication of this research was the lack of transparency, market access and fair competition, supports the process of monitoring and auditing, and real-time information access on Nagan Raya Regency Government.

Key Words: Implementation, Information Systems, Electronic Procurement Service, Needs Assessment.

ABSTRAK

Zulfadli. 2014. Analisis Implementasi Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berbasis Needs Assessment pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya. Padang: Program Magister Chief Information Officer (CIO) Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya beberapa *gaps* (kesenjangan) antara kebutuhan dan implementasi sistem informasi LPSE di Kabupaten Nagan Raya, di antaranya masalah penempatan SDM TI yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan teknis dan manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tercapainya kebutuhan *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal dengan diimplementasikannya LPSE pada Pemdakab. Nagan Raya.

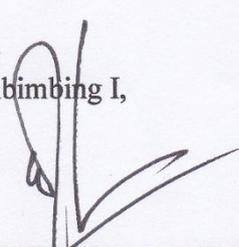
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi utama penelitian ini di LPSE Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Sumber data penelitian ini adalah pimpinan, panitia pengadaan, pengelola LPSE, penyedia barang dan jasa. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrument panduan wawancara, lembar observasi, dan studi dokumentasi.

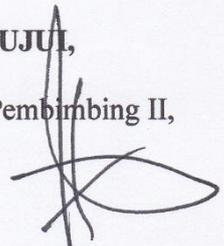
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi sistem informasi LPSE berbasis *needs assessment* pada Pemdakab. Nagan Raya secara umum sudah memenuhi kebutuhan *stakeholders*, ditinjau dari transparansi, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan audit, dan akses informasi yang *real time*. Implikasi dari penelitian ini adanya transparansi, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan audit, dan akses informasi *real time* pada LPSE Pemdakab. Nagan Raya.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi, LPSE, *Needs Assessment*.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

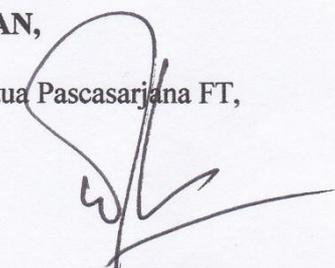
Mahasiswa : Zulfadli
NIM : 1200165
Program Studi : Magister (S2) CIO

Pembimbing I,

Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed.
NIP. 195208221977101001

MENYETUJUI,
Pembimbing II,

Drs. Svahril, S.T., MSCE., Ph.D.
NIP. 196405061989031002

Dekan,

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

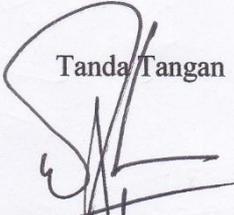
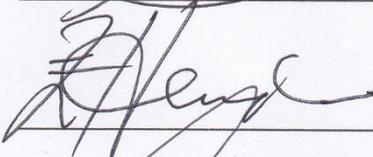
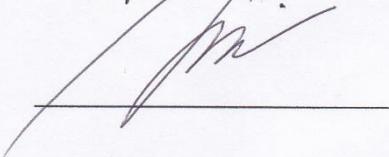
PENGESAHAN,
Ketua Pascasarjana FT,

Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed.
NIP. 195208221977101001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS**

TESIS

Mahasiswa : Zulfadli
NIM : 1200165

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis
Program Magister *Chief Information Officer*
Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Tanggal: 11 November 2014

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed.</u> (Ketua)	
2	<u>Drs. Syahril, S.T., MSCE., Ph.D.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Dr. M. Giatman, MSIE.</u> (Anggota)	
4	<u>Drs. Zulhendra, M.Kom.</u> (Anggota)	
5	<u>Mukhlidi Muskhir, S.Pd., M.Kom.</u> (Anggota)	

Padang, 11 November 2014
Program Studi Magister (S2) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Ketua,



Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T.
NIP. 195912041985031004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berbasis *Needs Assessment* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Maret 2015
Saya yang menyatakan



Zulfadli
NIM. 1200165

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan Rahmat, Karunia, dan ‘Alim-Nya yang tak terhingga kepada Makhluk-Nya. Shalawat dan Salam semoga Allah sampaikan kepada suri tauladan umat yang mulia dan terpuji Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya ‘Ilmu dengan Nurnya, kemudian kepada Keluarganya, para Sahabatnya, para Auliya, dan para ‘Ulama yang senantiasa menjadikan ilmu penerang kehidupan di muka bumi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berbasis *Needs Assessment* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya”, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister *Chief Information Officer (CIO)* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Penelitian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed selaku Ketua Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang sekaligus sebagai pembimbing I serta Bapak Drs. Syahril, ST, MSCE, Ph.D selaku Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Fahmi Rizal, M.Pd., M.T. selaku Ketua Program Studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Muhammad Adri, S.Pd., M.T. selaku pengelola program beasiswa Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

5. Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM sebagai penyandang dana program beasiswa Magister *Chief Information Officer*.
6. Bapak Dr. M. Giatman, MSIE, Bapak Drs. Zuhendra, M.Kom, dan Bapak Mukhlidi Muskhir, S.Pd, M.Kom selaku kontributor dan pembahas yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya yang telah memberikan tugas belajar sehingga peneliti dapat melanjutkan pendidikan pada Program Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua, mertua, istriku tercinta, dan kedua adikku yang telah memberikan semangat dan doa.
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Magister *Chief Information Officer* Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Serta semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca yang budiman untuk kesempurnaan tesis yang akan datang.

Terakhir, peneliti menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana yang disusun ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Padang, Maret 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoretis.....	12
1. Konsep Dasar Sistem Informasi.....	12
a. Pengertian Sistem Informasi.....	12
b. Komponen Sistem Informasi	14
c. Pendekatan Pengembangan Sistem Informasi	15
2. Sistem Informasi berbasis <i>Needs Assessment</i>	17
a. Pengertian <i>Needs Assessment</i>	17
b. Aktivitas dalam <i>Needs Assessment</i>	21
c. Teknik dan Alat dalam <i>Needs Assessment</i>	30

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	31
4. Implementasi LPSE Meningkatkan Transparansi	40
5. Implementasi LPSE Meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan Usaha Yang Sehat	43
6. Implementasi LPSE Mendukung Proses Monitoring dan Audit	44
7. Implementasi LPSE Meningkatkan Akses Informasi <i>Real Time</i>	45
B. Kajian Penelitian yang Relevan	46
C. Kerangka Konseptual	48
D. Pertanyaan Penelitian	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	50
B. Latar Penelitian	52
C. Variabel Penelitian	52
D. Indikator Variabel Penelitian	52
E. Data dan Sumber Data Penelitian	55
F. Teknik Pengumpul Data	57
G. Keabsahan Data	58
H. Teknik Analisis Data	59

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LPSE dan ULP Pemdakab. Nagan Raya	60
1. Profil LPSE Pemdakab. Nagan Raya	60
a. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSE Pemdakab. Nagan Raya	60
b. Tata Kerja LPSE Pemdakab. Nagan Raya	69
c. Proses Kerja LPSE Pemdakab. Nagan Raya	70
2. Profil ULP Pemdakab. Nagan Raya	78
a. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur ULP Pemdakab. Nagan Raya	78
b. Tata Kerja ULP Pemdakab. Nagan Raya	83
3. Perangkat Sistem LPSE Pemdakab. Nagan Raya	85

B. Temuan Penelitian	87
1. Implementasi LPSE Meningkatkan Transparansi	88
2. Implementasi LPSE Meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan Usaha Yang Sehat	93
3. Implementasi LPSE Mendukung Proses Monitoring dan Audit	99
4. Implementasi LPSE Meningkatkan Akses Informasi <i>Real Time</i>	103
C. Pembahasan	109
1. Implementasi LPSE Meningkatkan Transparansi	110
2. Implementasi LPSE Meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan Usaha Yang Sehat	113
3. Implementasi LPSE Mendukung Proses Monitoring dan Audit	115
4. Implementasi LPSE Meningkatkan Akses Informasi <i>Real Time</i>	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	119
B. Implikasi.....	119
C. Saran	120
DAFTAR RUJUKAN	121
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Halaman Depan <i>Website</i> LPSE Pemdakab. Nagan Raya	6
2.1 Komponen Sistem Informasi	14
2.2 Kerangka Umum Peningkatan Kinerja	16
2.3 Siklus <i>Needs Assessment</i>	16
2.4 Kebutuhan adalah kesenjangan dalam hasil, konsekuensi, atau prestasi.....	19
2.5 <i>Gaps</i> (kesenjangan) antara hasil saat ini (<i>current result</i>) dan hasil yang diinginkan (<i>desired or required result</i>)	19
2.6 Kesenjangan dalam praktek penilaian kebutuhan.....	22
2.7 Tahapan dan langkah dasar penilaian kebutuhan	25
2.8 Kerangka Berfikir	48
4.1 Struktur Organisasi LPSE Pemdakab. Nagan Raya.....	62
4.2 Alur Proses Kerja LPSE Pemdakab. Nagan Raya	70
4.3 Proses Pendaftaran Penyedia	72
4.4 Proses Persiapan Pengadaan LPSE	74
4.5 Struktur Organisasi ULP Pemdakab. Nagan Raya.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rekapitulasi Pengelola LPSE Pemdakab. Nagan Raya	7
4.1 Rekapitulasi Penyedia LPSE Pemdakab. Nagan Raya	97
4.2 Rekapitulasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemdakab. Nagan Raya.....	106
4.3 Rekapitulasi Pengelola LPSE Pemdakab. Nagan Raya	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang	124
2. Izin Melaksanakan Penelitian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.....	125
3. Tampilan <i>Website</i> LPSE Pemdakab. Nagan Raya	126
4. Tampilan <i>Website</i> RUP Kabupaten Nagan Raya	132
5. Dokumentasi Penelitian	135
6. Peraturan Bupati Nagan Raya No. 10 Tahun 2013	138
7. Peraturan Bupati Nagan Raya No. 14 Tahun 2013	140
8. Uji Validitas Instrumen Penelitian	142
9. Lembar Observasi Penelitian	143
10. Lembar Wawancara Penelitian.	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan semangat otonomi kepada setiap daerah, untuk berlomba-lomba memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, otonomi daerah merupakan tantangan yang menuntut Pemerintah Daerah untuk selalu mengembangkan inovasi, strategi, dan ide-ide baru dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Untuk itu diperlukan media yang mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan maupun kritikan.

Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government (e-Government Development Framework)* melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-Government*. Dengan dikeluarkannya INPRES No. 3 Tahun 2003, memicu setiap lembaga pemerintahan di Indonesia berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam implementasi *e-Government*. Lembaga pemerintahan harus segera mengimplementasikan *e-Government* agar dapat memanfaatkan teknologi untuk menghapus birokrasi, terciptanya transparansi serta memudahkan pengaksesan informasi bagi instansi-instansi pemerintahan dengan sistem yang terintegrasi. Implementasi *e-Government* diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen baik negara, daerah, masyarakat maupun dunia usaha dapat

memperoleh informasi dan layanan pemerintahan kapanpun dan di manapun.

Menurut Inpres No. 3/2003:

Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Kemajuan sistem informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Pemanfaatan sistem informasi diharapkan dapat tersedianya keterbukaan informasi publik yang merupakan hak setiap orang dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Hal ini juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan UU KIP, upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan dapat dipercepat. Langkah itu merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UU No. 14/2008:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Tersedianya sistem informasi dan keterbukaan informasi publik, akan mempercepat tercapainya *e-Government* yang tepat sehingga akan diperoleh manfaat dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat secara signifikan. Pemahaman tentang penerapan *e-Government* merupakan kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan ini meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan fokus kegiatan serta langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) di Indonesia.

Salah satu implementasi sistem informasi sebagai bentuk dari penerapan *e-Government* dalam menyediakan informasi publik adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Layanan ini sebagai tindak lanjut dari landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*), yaitu Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan aturan teknis mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus didasarkan persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*) yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 107 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Implementasi *e-Procurement* di lingkungan instansi pemerintahan merupakan sebuah tantangan. Sistem pengadaan barang/jasa termasuk bidang yang mengalami inovasi karena perkembangan teknologi informasi. Pengadaan barang/jasa secara manual, sarat dengan berbagai kelemahan yang dimanfaatkan baik oleh oknum panitia lelang maupun oleh penyedia. Misalnya, timbul sebuah kondisi pasar pengadaan yang bersifat tertutup dan terkotak-kotak, sehingga

pengadaan hanya bisa dilaksanakan oleh pengguna serta penyedia yang terbatas (kurang transparan). Tender secara manual juga sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi dengan terjadinya rekayasa tender. Persaingan usaha yang tidak sehat (*premanisme bad governance*), kolusi, persekongkolan antara pengguna dan calon penyedia, antara sesama calon penyedia, informasi harga dan akses pasar yang terbatas dan tersekat-sekat (*fragmented*) melatarbelakangi munculnya peraturan tentang pengadaan secara elektronik.

Diterapkannya *e-Procurement* akan memberikan keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna maupun penyedia lelang elektronik. Proses lelang akan lebih cepat dan lebih hemat karena tidak harus menyerahkan dokumen administrasi lelang yang biasanya bertumpuk-tumpuk, serta dapat menurunkan kasus sanggah maupun sanggah banding. Implikasi pengadaan secara elektronik secara garis besar akan meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan efisiensi pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan akses informasi yang *real time*.

Implementasi LPSE lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Perka LKPP ini menjelaskan bahwa LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/I kepada Portal Pengadaan Nasional. LPSE dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah satu unit kerja dengan memaksimalkan organisasi yang ada atau bersifat *ad-hoc* (kepanitiaan). Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menghindari pertentangan kepentingan. Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE. Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi teknis dan manajerial dan memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ULP/Pejabat Pengadaan. Perangkat organisasi LPSE

yang berdiri sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi: Kepala, Sekretariat, Unit Administrasi Sistem Elektronik, Unit Registrasi dan Verifikasi, Unit Layanan dan Dukungan.

Pada tahun 2008 terdapat 5 unit LPSE dan hingga tahun 2014 sudah terdapat 186 unit LPSE di Indonesia. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab.) Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh dengan Ibukotanya Suka Makmue, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak 22 Juli 2002, yang diatur oleh UU No 4 Tahun 2002. Salah satu implementasi sistem informasi di Pemdakab. Nagan Raya dalam menyediakan informasi publik adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sudah terdaftar sejak Oktober 2012 dan mulai berjalan sejak Januari 2013.

Penerapan sistem informasi LPSE di Pemdakab. Nagan Raya memberikan kemudahan dari sisi pengguna, penyedia, dan masyarakat dengan adanya layanan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pada proses pengadaan *non e-Procurement* (manual), diperlukan waktu minimal satu hari untuk menayangkan pengumuman pelelangan. Jangka waktu akan lebih panjang jika pengumuman dilakukan melalui media massa, mulai dari mendatangi biro iklan atau pihak surat kabar hingga pengumuman tersebut tersedia dan telah tayang dan siap dibaca oleh umum. Sedangkan dengan adanya LPSE, setelah panitia menyiapkan jadwal waktu pelelangan, serta syarat-syarat kualifikasi dan dokumen pengadaan yang akan diunggah ke web LPSE Pemdakab. Nagan Raya (www.lpse.naganrayakab.go.id), panitia langsung dapat memasukkan informasi tersebut ke SPSE. Pengumuman tersebut akan langsung bisa diakses oleh masyarakat umum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari segi biaya, pengguna juga mendapatkan biaya yang lebih murah karena pada pengumuman melalui media massa tentunya terdapat biaya untuk iklan tersebut. Biaya yang dikeluarkan berkisar antara 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah tergantung dari lama penayangan, ukuran hingga dihalaman berapa pengumuman tersebut dimuat. Melalui LPSE, biaya penayangan relatif murah, bahkan bisa dikatakan tidak ada, karena LPSE Pemdakab. Nagan Raya telah memiliki akses internet dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Penyedia juga dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya transportasi, akomodasi, dan biaya cetak dokumen. Pada pengadaan manual penyedia harus membayar biaya pendaftaran dan cetak dokumen sebesar 200 ribu rupiah, ditambah lagi biaya transportasi dan akomodasi penyedia ke dinas tempat pendaftaran lelang. Bagi yang berada di luar daerah Kabupaten Nagan Raya mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi yang lebih besar. Dengan adanya LPSE, penyedia tidak mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi, dan biaya cetak dokumen. Penyedia hanya perlu menyediakan biaya akses internet untuk bisa melakukan pendaftaran online pada web LPSE Pemdakab. Nagan Raya.

Implementasi LPSE bersifat transparan, karena masyarakat umum juga mendapatkan informasi secara terbuka tentang sistem pengadaan barang dan jasa pada pemdakab Nagan Raya yang dapat dilihat pada web LPSE Pemdakab. Nagan Raya. Gambar 1.1 berikut adalah tampilan halaman depan *website* LPSE pemdakab Nagan Raya.

The screenshot shows the homepage of the LPSE (Local Procurement System) for Kabupaten Nagan Raya. The page is designed with a professional layout, featuring a header with the organization's logo and name. Below the header, there is a navigation menu and several key sections. On the left side, there are links to national procurement portals and a search function. The main content area is divided into several columns, including a list of procurement packages, recent announcements, and news items. The page also includes a visitor count and various utility links for suppliers and the public.

Gambar 1.1. Halaman Depan *Website* LPSE Pemdakab. Nagan Raya
Sumber: www.lpse.naganrayakab.go.id

Pemdakab. Nagan Raya telah menyediakan 4 (empat) unit server untuk mendukung aktivitas sistem informasi LPSE, yang berfungsi sebagai master program (aplikasi) LPSE, sebagai *back up* data LPSE dan 2 (dua) unit sebagai database. Sumber daya manusia (SDM) LPSE pemdakab Nagan Raya dilihat dari kualifikasi pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel 1 dibawah ini terdiri dari 1 (satu) orang Magister Komputer, 1 (satu) orang Magister Pertanian, 1 (satu) orang Sarjana Sosial, 1 (satu) orang Sarjana Ekonomi, 1 (satu) orang Sarjana Hukum, 2 (dua) orang Sarjana Muda, dan 3 (tiga) orang SLTA. Struktur organisasi LPSE Pemdakab. Nagan Raya berada di bawah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Nagan Raya, Kepala Bagian Pembangunan merangkap sebagai Ketua dan admin Pusat Pelayanan Elektronik (PPE) LPSE. Perangkat organisasi LPSE terdiri dari: Pengarah, Ketua, Sekretaris, Bidang Administrasi Sistem Informasi, Bidang Registrasi dan Verifikasi, Bidang Layanan Pengguna, Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Pengelola LPSE Pemdakab. Nagan Raya

No	Jabatan Pengelola	Kualifikasi Pendidikan	Instansi
1	Ketua/Admin PPE	Sarjana Sosial (S1)	Bagian Pembangunan Setdakab
2	Admin System	Magister Komputer (S2)	Bagian Humas Setdakab
3	Admin Agency	DIII Akuntansi	Bagian Pembangunan Setdakab
4	Admin Agency	SLTA	Sekretariat KORPRI
5	Trainer	Magister Pertanian (S2)	Bagian Pembangunan Setdakab
6	Trainer	Sarjana Hukum (S1)	Bagian Pemerintahan Setdakab
7	Verifikator	SLTA	BP2T-PM
8	Verifikator	SLTA	BP2T-PM
9	Helpdesk	DIII Akuntansi	Bagian Pembangunan Setdakab
10	Helpdesk	Sarjana Ekonomi (S1)	Dispencapil

Pemdakab. Nagan Raya memberikan rekomendasi pengembangan sistem informasi yang bisa dijadikan acuan dasar yang sifatnya komprehensif bagi pengembangan sistem informasi LPSE. Rekomendasi pengembangan sistem ini melibatkan seluruh faktor yang mempunyai andil dalam menyelenggarakan suatu jasa layanan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor kepemimpinan,

sumber daya manusia, organisasi, sistem manajemen, sarana komunikasi, piranti keras, piranti lunak, anggaran, dan lain-lain.

Analisis implementasi sistem informasi LPSE berbasis *needs assessment*, diawali dengan melakukan identifikasi dan pemetaan kondisi awal, yang berasal dari isu-isu strategis dan pelaksanaan dari kebijakan pengembangan sistem informasi di LPSE Pemdakab Nagan Raya. Berdasarkan observasi awal, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di atas, LPSE tidak sepenuhnya dikelola oleh SDM dengan kualifikasi teknis dan manajerial, hal ini tidak sejalan dengan Perka LKPP No. 2 Tahun 2010. Menurut Perka LKPP No. 2 Tahun 2010 pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE. Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan antara lain: (a) memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; (b) memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK ULP/Pejabat Pengadaan. Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

LPSE Pemdakab. Nagan Raya hanya memiliki satu orang pengelola yang memenuhi persyaratan tersebut, yaitu dari kualifikasi pendidikan Magister Komputer. Selain itu, pihak pimpinan masih membiarkan kekosongan jabatan pada sekretariat LPSE, sehingga tidak ada pegawai yang bertugas untuk mengelola masalah administrasi LPSE. Hal ini berdampak pada susah dan lambatnya pengurusan administrasi untuk kesejahteraan dan pengembangan SDM pengelola LPSE.

Peran *help desk* dipegang oleh pengelola LPSE Pemdakab. Nagan Raya bukan dari panitia atau ULP yang mengerti mengenai permasalahan pengadaan. Sehingga apabila ada pertanyaan menyangkut pengadaan atau pertanyaan terkait *Aanwijzing*, *help desk* selalu meminta penanya untuk menanyakan langsung ke panitia atau dinas terkait sebagai terlihat pada Lampiran 3 mengenai menu tanya jawab. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan pengguna/penyedia karena permasalahannya tidak dapat dikonsultasikan dengan *help desk*. Pada menu tanya jawab *website* LPSE Pemdakab. Nagan Raya juga tidak ditampilkan waktu

diajukannya pertanyaan dan jawaban, hal ini membuktikan informasi yang tidak *real time*.

Perangkat keras dan infrastruktur jaringan LPSE Pemdakab. Nagan Raya masih belum sempurna, terlihat dari server tidak dapat diakses dalam waktu yang cukup lama sehingga peserta gagal melakukan *upload* dokumen penawaran dan gagal mengunduh dokumen lelang. Permasalahan tersebut menunjukkan masih terdapat masalah dan kelemahan dalam pelaksanaan LPSE Pemdakab. Nagan Raya. Berdasarkan kesenjangan tersebut, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi lebih lanjut berdasarkan analisis *needs assessment* terhadap implementasi sistem informasi LPSE dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* LPSE, ditinjau dari aspek transparansi, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, proses monitoring dan audit, dan akses informasi yang *real time*.

Penelitian ini dilakukan di LPSE Pemdakab. Nagan Raya, berfokus pada kebutuhan *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholders* internal menyangkut kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam implementasi LPSE, kebutuhan panitia pengadaan barang dan jasa dalam implementasi LPSE, dan kebutuhan pengelola LPSE dalam menjalankan LPSE. *Stakeholders* eksternal akan menganalisis mengenai kebutuhan penyedia barang dan jasa dalam implementasi LPSE. Berdasarkan permasalahan seperti tersebut di atas, penulis tertarik membahas dan mengangkat kasus ini dalam penelitian dengan judul: **“Analisis Implementasi Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berbasis *Needs Assessment* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berbasis *Needs Assessment* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, ditinjau dari aspek transparansi, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, proses monitoring dan audit, dan akses informasi yang *real time*. Objek penelitian adalah *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal. *Stakeholders* internal yaitu: pihak pimpinan yang terkait dalam implementasi LPSE, panitia pengadaan barang dan jasa, dan pengelola

LPSE). *Stakeholders* eksternal adalah para penyedia barang dan jasa yang memanfaatkan LPSE Pemdakab. Nagan Raya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, penulis tertarik melakukan analisis penilaian kebutuhan *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal, ditinjau dari beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi sistem informasi LPSE Pemdakab. Nagan Raya dapat meningkatkan transparansi?
2. Apakah implementasi sistem informasi LPSE Pemdakab. Nagan Raya dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat?
3. Apakah implementasi sistem informasi LPSE Pemdakab. Nagan Raya dapat mendukung proses monitoring dan audit?
4. Apakah implementasi sistem informasi LPSE Pemdakab. Nagan Raya dapat meningkatkan akses informasi yang *real time*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berbasis *Needs Assessment* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal, ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. meningkatkan transparansi,
2. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
3. mendukung proses monitoring dan audit,
4. meningkatkan akses informasi yang *real time*.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam implementasi sistem informasi untuk mewujudkan *e-Government*,
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu panduan lebih lanjut yang lebih terinci sehingga memudahkan Pemerintah

Daerah Kabupaten Nagan Raya melakukan implementasi sistem informasi ke depannya.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan khususnya Fakultas Teknik Magister *Chief Information Officer* Universitas Negeri Padang, sebagai karya ilmiah dan sumbangan pemikiran dalam ranah pengetahuan teknis implementasi sistem informasi LPSE berbasis *Needs Assessment*.